ANALISIS PENGARUH FAKTOR TEHNIS TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN (AUDIT)

(Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Lombok Timur)

SULAIMAN

FKIP. Universitas Gunung Rinjani

ABSTRAK

Dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, kecakapan profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Aspek aspek tersebut mendukung faktor-faktor tehnis seorang auditor yaitu kompetensi tehnis, independensi, dan kepatuhan pada kode etik, sehingga berdampak pada mutu atau kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; a) apakah kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik memiliki pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. b) Manakah dari kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain.

Dari hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (kompetensi tehnis, independensi, dan kepatuhan pada kode etik) memilki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kualitas hasil pemeriksaan). Variabel kepatuhan pada kode etik merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, ini disebabkan karena pegawai inspektorat Kabupaten Lombok Timur masih memegang kode etik dan standar audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Kata Kunci : Kompetensi tehnis, independensi, kepatuhan pada kode etik, kualitas pemeriksaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah bagi bangsa Indonesia merupakan suatu proses transformasi politik dan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terjadi proses peruahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang positif dan berdmpak baik bagi kebijakan ataupun pengelolaan pemerintahan kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tentu saja hal ini menjadi harapan sekaligus menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk bisa lebih mandiri dan maju dalam hal pembangunan baik yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia maupun imprastrukturnya yang salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel.

Pemberlakukan otonomi daerah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Salah satu yang menjadi semangat dari undang-undang otonomi tersebut adalah tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berarti terdapat kewenangan yang besar bagi daerah dalam pembagian dan pengeloalaan keuangannya jika dibandingkan dengan saat masih bersifat sentral di pemerintahan pusat. Karena itulah guna mewujudkan dampak positif bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka setiap daerah membutuhkan system pengawasan yang baik untuk menjamin pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di daerah mengikuti arah kebijakan dan output yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan aparat pengawas daerah yang mampu mengontrol kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transfaran dan akuntabel.

Tentang fungsi dan kewenangan dari aparat pengawas tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24) mengatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Yang dimaksud dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam peraturan pemerintah ini adalah Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintan Non Departemen, Inpektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bagi suatu daerah Inspektorat sebagai salah satu lembaga pemerintahan sebagaimana yang sebutkan dalam undang-undang merupakan lembaga tempat berkumpulnya aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Lembaga ini sangat dituntut peranannya dalam mengendalikan atau mengawasi jalannya pemerintahan secara menyeluruh sehingga dapat menentukan status atau kualitas suatu daerah dalam hal pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah. Lembaga ini akan menghasilkan sebuah laporan dari setiap hasil pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan selama periode tertentu terhadap pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan keuanagan di suatu daerah. Tentu saja kualitas yang baik dari hasil pemeriksaan menjadi hal yang niscaya diharapkan dari lembaga ini sehingga dapat mencerminkan keoyektifan fakta dari proses pengelolaan yang dilakukan di daerah yang diawasi dan periksa.

Tentang kualitas hasil pemeriksaan, Batubara (2008) dalam penelitiannya menyatakan, bahwa kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, pengetahuan auditor sangatlah berpengaruh, semakin banyak pengetahuan seorang auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. Kecakapan profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Seorang Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan. Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan professional (professional judgement).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, latar belakang pendidikan seorang auditor APIP mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S1) atau yang setara. Standar Umum 2220 mengatakan bahwa selain memiliki keahlian tentang standar audit, seorang auditor juga diwajibkan memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan dan didukung oleh keahlian seperti auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Dengan demikian, sesuai undang – undang APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku berdasarkan kode etik APIP dan standar audit APIP agar tercipta aparat pengawasan yang bersih dan berwibawa.

Selain latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, kompetensi tehnis, independensi, dan kepatuhan pada kode etik, masih ada beberapa faktor teknis lainnya yang sebenarnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh seorang auditor diantaranya yaitu obyektifitas, pengalaman kerja, kecermatan profesi, dan lainnya. Walaupun pada kenyataannya, banyak sekali para auditor, pengawas pemerintahan atau yang membantu mereka bekerja tidak dapat memenuhi faktor-faktor teknis tersebut, termasuk diantaranya adalah masalah latar belakang pendidikan auditor APIP yang masih banyak belum S1, memiliki sertifikat JFA, tidak terjaganya independensi dan melanggar kepatuhan pada kode etik.

Selain pelanggaran terhadap faktor-faktor teknis, ada beberapa faktor non teknis yang biasa sering terjadi dan memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan kualitas hasil pemeriksaan auditor, diantaranya berupa kedekatan auditor dengan klien, adanya tekanan dari pimpinan auditor dan pihak lainnya, penghasilan auditor APIP yang masih belum memadai, sampai dengan moral hazard dari para pemeriksa atau pengaudit tersebut.

Ketidak sesuaian yang terjadi baik factor kesengajaan berupa Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat teknis mapun non teknis tersebut diduga kuat akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh auditor APIP khususnya auditor yang ada pada inspektorat Kabupaten Lombok Timur..

Dalam penelitian ini pengamatan atau kajian fakta lebih difokuskan pada faktor tehnis yaitu kompetensi tehnis, independensi, dan kepatuhan pada kode etik seorang auditor dihubungkan dengan kualitas hasil pemerikasaan yang dihasilkan. Dari hasil identifikasi awal ada beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Belum terpenuhinya persyaratan standar pendidikan bagi APIP di Kabupaten Lombok Timur;
- b. Pengetahuan dan kompetensi tehnis dari APIP masih kurang, khususnya dalam akuntansi;
- c. Sering kali permasalahan-permasalahan yang bersifat tidak urgen menyebabkan seorang auditor APIP kehilangan obyektifitas dan independensinya
- d. Banyaknya auditor APIP yang belum memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sehingga berpengaruh kepada kompetensi dan kredibilitas auditor.
- e. Pengalaman APIP masih kurang, khususnya dalam mengenal obyek yang akan diaudit, sehingga terjadi penarikan kesimpulan yang belum tepat saat proses audit telah dilakukan.

Rumusan masalah

Dari uraian di atas maka pertanyaan yang harus dijawab atau rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah adalah :

- a. Apakah kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan ?.
- b. Apakah kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan ?.
- c. Manakah dari ketiga variable independen tersebut (kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik) yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap variable dependen (kualitas hasil pemeriksaan)?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
- b. Untuk mengetahui apakah kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
- c. Untuk mengetahui manakah dari kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Diharapkan hasil penelitin ini dapat bermanfaat bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan cakrawala berfikir mengenai variable-variabel yang memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP dan Bagi Inspektorat dan Perangkat Daerah, dapat memahami variable-variabel yang memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan guna sebagai bahan kajian, pertimbangan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas keinspektoratan sehingga nantinya hasil audit yang dikeluarkan dalam bentuk LHP dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut Umar (2003:30) penelitian asosiatif kausal adalah "penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain".

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf Inspektorat Kabupaten Lombok Timur. Adapun jumlah karyawan/karyawati pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur berjumlah 80 (delapan puluh) orang yang terdiri dari : 1 orang Inspektur, 1 orang Sekretaris, 4 orang Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), 3 orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), 10 orang Pengawas Pemerintah Muda, 7 orang Pengawas Pemerintah Pertama, 4 (empat) orang Auditor, 2 orang Auditor Muda, 2 orang Auditor Pertama dan 46 orang Staf.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang karyawan/karyawi Inspektorat Lombok Timur yang dianggap cukup representatif dalam mewakili populasi. Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan oleh *Isaac* dan *Michael* dalam Sugiyono, (2012: 126) berikut:

$$s = \frac{\lambda^2.N.P.Q}{d^2(N-) + \lambda^2.P.Q}$$

Keterangan: λ^2 = dengan dk = 1, s = jumlah sampel, N = jumlah populasi, P = Q = 0,5,d = tingkat signifikansi = 0,05

Analisis Data.

Sebelum dilakukan uji regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebagaimana dijelaskan oleh Algifari (2000: 83) mengatakan model

regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*ordinary least square/OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear yang tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimator/BLUE*). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik yaitu Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas

Analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabelin dependen (Ghozali, 2006: 45). Analisis data dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing variabel terikat dan bebas dan dilanjutkan dengan meregresikan variabel bebas dengan variabel terikat dengan model regresi berganda.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dengan menentukan nilai Y (sebagai variabel dependen) dan untuk menaksir nilai-nilai yang berhubungan dengan X (sebagai variabel independen), dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana : Y = Kualitas Hasil Pemeriksaan, a = Konstanta, X1= Kompetensi tehnis, X2 = Independensi, X3 = Kepatuhan pada kode etik, β = Koefisien regresi, e = Error

Analisa data dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 for windows sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah model regresi bebas dari gejala asumsi klasik agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan ukuran dan bebas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi karena adanya gejala-gejala tersebut.

Dalam analisis regresi berganda, dapat digunakan *goodness of fit* untuk mengukur ketepatan dalam menaksir nilai aktual. Menurut Ghozali (2006: 83), disebutkan bahwa secara statistik *goodness of fit* dapat diukur dari koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistic, dan *R Square* untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel indepeden menjelaskan variabel dependen.

Jika koefisien determinasi (R²) yang diperolehnya besarnya mendekati satu (1) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap varibel terikat (Ghozali. 2006: 83).

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Bila t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, demikian sebaliknya. Atau dengan melihat signifikasinya. Jika nilai probabilitas signifikansi yang terbentuk di bawah 5% (Sig. < 0.05), maka Ha diterima dan Ho ditolak atau sebaliknya.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006: 127). Model dikatakan Fit jika nilai probabilitas signifikan kurang 5%. Atau membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006: 168). Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrument penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Arikunto (2006: 170) menyatakan bahwa apabila nilai korelasi (r) dibandingkan dengan angka kritis dalam table korelasi, untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan taraf signifikansi 5% dan jika r-hitung > r-tabel maka pernyataan tersebut dianggap valid. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 34 maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui r *product moment pearson* dengan df (degree of freedom) = n - 2, jadi df = 34 - 2 = 32, maka r tabel =0,291. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dapat dilihat dari Corrected Item Total Correlation. Analisis outputnya sebagai berikut:

Berdasarkan output hasil uji validitas terhadap kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, dari 40 pertanyaan yang dinyatakan valid sebanyak 38 pertanyaan sedangkan pernyataan nomor 2 dan nomor 14 dianggap tidak valid, sehingga pertanyaan nomor 2 dan nomor 14 pada uji berikutnya akan dianggap tidak ada/terbuang.

Hasil Uji Reliabilitas.

Tabel 1. Hasil Uji Realibilitas

Reliability statistics

Cronbach's Alpha	N of items
0.948	40

Sumber :lampiran 5 diolah

Berdasarkan output hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana terlihat dalam Table 1 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha > 0,6, ini berarti bahwa kontruk pernyataan yang merupakan dimensi variable dinyatakan reliable dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Multikolinearitas.

Table 2. Hasil Uji Multikolinearitas.

Coefficients^a

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients			Collinearity	Statistics
Mode	el	В	Std. Error	Beta	t	Siq.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.264	4.511		.724	.475		
	Kompetensi Teknis	.223	.105	.262	2.127	.042	.622	1.609
	Independensi	.165	.133	.158	1.239	.225	.581	1.720
	Kepatuhan Pada Kode Etik	.532	.124	.556	4.284	.000	.561	1.782

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sumber: lampiran 6 diolah

Berdasarkan Table 2 di atas, terlihat bahwa Kompetensi Tehnis memiliki *Variance Inflation Factor* (VIF) = 1,609 dan nilai *Tolerance* = 0,622, Independensi memiliki *Variance Inflation Factor* (VIF) = 1,720 dan nilai *Tolerance* = 0,581, dan Kepatuhan pada Kode Etik memiliki *Variance Inflation Factor* (VIF) = 1,782 dan nilai *Tolerance* = 0,561. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara variable-variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

1. Hasil Uji Autokorelasi.

Table 3. Hasil Uji Autokorelasi.

Model Summary^b

Mode I	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.846 =	.716	.688	2.108	1.949

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pada Kode Etik, Kompetensi Teknis, Independensi

b. Dependent Variable: Kualitas Hasil Pemeriksaan

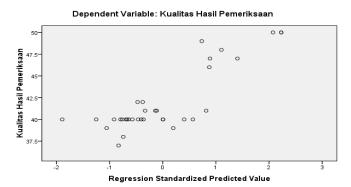
Sumber: lampiran 6 diolah

Berdasarkan Table 3 di atas, nilai durbin watson tabel dapat dilihat di tabel Durbin Watson (k, n) jadi (3, 34) (k adalah jumlah variabel independent) diperoleh nilai du dan dl maka nilai du dan dl adalah 1,652 dan 1,271, maka nilai autokorelasi diantara 1,652 < 1,949 < 2,384. Karena nilai du < d < 4 – du maka dapat dikatakan bahwa antara variable-variabel tersebut tidak terjadi autokorelasi.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Scatterplot



Sumber: lampiran 7 diolah

Dari gambar tersebut di atas, maka kita dapat melihat :

- a. Titik titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar 0
- b. Titik titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik titik tidak berpola.

Berdasarkan hasil gambar scatterplot diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan digunakan persamaan regresi ini adalah untuk melakukan pendugaan atau taksiran variasi variable terikat yang disebabkan oleh variasi nilai variable bebas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh hasil olehan sebagai berikut:

Table 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.

Coefficients

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model	l .	В	B Std. Error		t	Siq.
1	(Constant)	3.264	4.511		.724	.475
	Kompetensi Teknis	.223	.105	.262	2.127	.042
	Independensi	.165	.133	.158	1.239	.225
	Kepatuhan Pada Kode Etik	.532	.124	.556	4.284	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sumber: lampiran 6 diolah

Berdasarkan tabel data di atas, maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = 3,264 + 0,223(X1) + 0,165(X2) + 0,532(X3) + e.$$

Dalam perhitungan menunjukkan semua variable bebas memiliki koefisien bertanda positif, sehingga persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: jika terjadi peningkatan kompetensi teknis, independensi, dan kepatuhan pada kode etik maka bisa meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Jika kompetensi tehnis naik sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil pemeriksaan akan naik sebesar 0,223 dengan asumsi konstan, begitu juga jika independensi naik sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil pemeriksaan akan naik sebesar 0,165 dengan asumsi konstan, Jika kepatuhan pada kode etik naik sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil pemeriksaan akan naik sebesar 0,532 dengan catatan asumsi konstan.

4. Hasil Koefisien Determinasi.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 =	.716	.688	2.108

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pada Kode Etik, Kompetensi Teknis, Independensi

Sumber: lampiran 6 diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka nilai dari koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh adalah 0,688. Hal ini menunjukkan bahwa 68,8% kualitas hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh kompetensi tehnis, independensi dan kepatuhan pada kode etik. Selebihnya yaitu 31,2% variabel kualitas hasil pemeriksaan dipengaruhi faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

5. Hasil Koefisien Korelasi.

Berdasarkan analisis regresi liner berganda (lihat Tabel 5) diperoleh nilai koefisien korelasi berganda atau Multiple (R) sebesar 0,846. Koefisien ini menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi variable dependen (kualitas hasil pemeriksaan) terhadap variable-variabel independen (kompetensi tehnis, independensi, dan kepatuhan pada kode etik). Nilai R yang tinggi, yaitu 0,846 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara semua variable independen dengan variable dependen.

6. Hasil Uji Parsial (Uji t).

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variable X1 terhadap variable Y, variable X2 terhadap variable Y, dan variable X3 terhadap variable Y. Kreteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

a. Melihat tingkat signifikansi dengan kreteria:

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima

Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak

b. Membandingkan t hitung dengan t tabel, dengan kreteria:

Jika -t tabel < t hitung < t tabel maka Ho diterima

Jika t hitung < -t tabel dan t hitung> t tabel maka Ho ditolak

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t).

Coefficients

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Siq.
1	(Constant)	3.264	4.511		.724	.475
	Kompetensi Teknis	.223	.105	.262	2.127	.042
	Independensi	.165	.133	.158	1.239	.225
	Kepatuhan Pada Kode Etik	.532	.124	.556	4.284	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sumber: lampiran 6 diolah

Dari Tabel 6 di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap pengaruh dependen, sebagai berikut:

a. Pengaruh Kompetensi Tehnis (X1) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y).

Cara 1 dari output diatas diperoleh Sig adalah 0,042 < 0,05 maka Ho ditolak.

Cara 2 untuk t tabel (df2 = n-k-1 = 30; dua sisi/0,025) = 2,035 dan t hitung = 2,127, jadi ada di daerah Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Teknis terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.

b. Pengaruh Independensi (X2) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y).

Cara 1 dari output di atas diperoleh Sig adalah 0,225 > 0,05 maka Ho diterima.

Cara 2 untuk t tabel (df2 = n-k-1 = 30; dua sisi/0,025) = 2,035 dan t hitung = 1,239, jadi ada di daerah Ho diterima sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.

c. Pengaruh Kepatuhan Pada Kode Etik (X3) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y).

Cara 1 dari output di atas diperoleh Sig adalah 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak.

Cara 2 untuk t tabel (df2 = n-k-1 = 30; dua sisi/0,025) = 2,035 dan t hitung = 4,284, jadi ada di daerah Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Kepatuhan pada Kode Etik terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.

7. Hasil Uji Simultan (Uji F).

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ketiga variable independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen. Untuk melihat pengaruh secara simultan atau secara bersama – sama dari valiabel X1, X2 dan X3 terhadap Y dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara:

Cara 1:

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima

Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak

Cara 2:

F hitung < F tabel maka Ho diterima

F hitung > F tabel maka Ho ditolak

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	336.671	3	112.224	25.251	.000=
	Residual	133.329	30	4.444		
	Total	470.000	33			

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pada Kode Etik, Kompetensi Teknis, Independensi

Sumber: lampiran 6 diolah

Dari Tabel 7 di atas, maka dapat diketahui pengaruh ketiga variable bebas terhadap variable terikat sesuai dengan kedua cara tersebut diatas.

Cara 1. Didapatkan sig 0,000 maka < 0,05 sehingga Ho ditolak.

Cara 2. Dimana F tabel (df1 = jumlah variabel-1=4-1, df2 = n-k-1=34-3-1) jadi (df1 = 3 = k, df2 = 30) = 2,922. K adalah jumlah variabel independen dimana F hitung adalah 25,251. Maka untuk F hitung (25,251) > F tabel (2,922) Ho ditolak.

Berdasarkan kedua cara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa antara ketiga variable bebas (kompetensi tehnis, Independensi dan kepatuhan pada kode etik) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat (kualitas hasil pemeriksaan).

PEMBAHASAN

1. Kompetensi Tehnis.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan, menyatakan bahwa kompetensi tehnis adalah kemampuan tehnis yang harus dimiliki oleh pemeriksa yang mempunyai pendidikan auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan, dan komunikasi. Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan pratek-praktek audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP.

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa variable kompetensi tehnis secara parsial berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian mendukung hopotesis H1a yang menyatakan bahwa kompetensi tehnis memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2009), Sukriah, dkk (2009), dan Efendy (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial kompetensi tehnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat.

b. Dependent Variable: Kualitas Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pengujian dan bukti empiris menunjukkan bahwa kemampuan tehnis yang dimiliki oleh seorang auditor APIP semakin meningkat, maka kualitas hasil pemeriksaan akan semakin meningkat pula. Temuan empiris ini sekaligus mendukung Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan khususnya tentang kompetensi tehnis.

2. Independensi.

Dari hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa variable independensi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur. Hasil pengujian ini tidak mendukung hopotesis H1b yang menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009) dan Efendy (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Temuan empiris ini sekaligus tidak mendukung Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan khususnya standar umum 2110 dan standar umum 2130. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung Peraturan BPK RI Nomor: 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena masih adanya campur tangan dan tekanan dari pimpinan APIP, pimpinan SKPD yang diperiksa, dan masih adanya kepentingan pribadi auditor dan pihak lain terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan.

3. Kepatuhan pada Kode Etik.

Dari hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa variable kepatuhan pada kode etik secara parsial memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur. Hasil pengujian ini mendukung hopotesis H1c yang menyatakan bahwa kepatuhan pada kode kode etik memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Temuan empiris ini sekaligus mendukung Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan dengan maksud dan tujuan adalah tersedianya pedoman prilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi prilaku auditor APIP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

- a. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variable independensi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena masih belum terbebasnya auditor dari berbagai kepentingan dan campur tangan berbagai pihak yang berkepentingan.
- b. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variable independen (kompetensi tehnis, independensi, dan kepatuhan pada kode etik) memilki pengaruh signifikan terhadap variable dependen (kualitas hasil pemeriksaan).
- c. Variabel kepatuhan pada kode etik merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, ini disebabkan karena pegawai inspektorat Kabupaten Lombok Timur masih memegang kode etik dan standar audit APIP.

Saran-saran

- a. Independensi merupakann variable yang tidak memiliki pengaruh, karenanya auditor APIP khususnya di Kabupaten Lombok Timur, diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi independensinya baik dalam fakta maupun penampilan, serta tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, agar menambah sempel dan memperluas lokasi penelitian sehingga diharapkan nantinya tingkat generalisasi dari analisis penelitian akan semakin lebih baik
- c. Penelitian berikutnya dapat menambahkan dan menggali variable-variabel lainnya seperti efisiensi anggaran dan tenggat waktu pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Dwi Ananing Tyas, 2006. Pengaruh Pengalaman terhadap Peningkatan Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati,2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bahan Ajar.: Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya
- Arens, A. Alvin, Randal J.E dan Mark S.B., 2008. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach*. Edisi Keduabelas.
- www.the akuntansi.com. diakses tanggal 28 Januari 2011.
- Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No: 43/KEP/2001 *Tentang Standar Kompetensi Jabatan structural*. Badan Kepegawaian Negara Tahun 2001.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta.29 Lehman, H. Constance dan C. S. Norman, 2006.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Sektor Publik: Suatu Sarana good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1 Hal: 1-17.
- Mayangsari, 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Serta Mekanisme orporate Governance Integritas Laporan Keuangan. Makalah.Simposium Nasional Akuntansi I.
- Muhidin, A. Sambas dan Maman Abdurrahman, 2007. *Analisa Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelelitian*.: Pustaka Setia Bandung
- Mulyadi, 2002. Auditing. Buku I, Edisi 6, Salemba Empat. Jakarta
- Mulyono, Agus, 2009. Analisis Faktor-Faktor Kompetensi Aparatur Inspektorat dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Tesis. Sumatera Utara: Ilmu Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2008. *Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Kode Etik dan Standar Audit,* Edisi Kelima, Jakarta
- Trisnaningsih, Sri, 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor. 3839.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Uyanto, S. Stanislaus, 2009. Pedoman Analisis Data dengan SPSS, Edisi 3, Garaha Ilmu Yogyakarta
- Wati, Elya, Lismawati dan Nila Aprilia, 2010. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governanceterhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Bengkulu).